

# Politika\_Mengurai Kecenderungan Gerakan Mahasiswa

*by* Izudin Ahmad

---

**Submission date:** 10-Jul-2020 11:16PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1355816868

**File name:** POLITIKA--Artikel\_Izudin.docx (79.11K)

**Word count:** 5320

**Character count:** 36255

# Mengurai Kecenderungan Gerakan Organisasi Kemahasiswaan Islam Pasca Reformasi

**Ahmad Izudin**

Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

## **Abstraksi:**

Tulisan ini mengurai jejak gerakan mahasiswa Islam pasca reformasi dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Islam Indonesia (KAMMI). Gerakan ini masih dianggap sebagai kekuatan masyarakat sipil untuk mewujudkan demokratisasi namun kecenderungannya tidak mengarah kepada transformasi sosial. Guna mengkaji masalah ini digunakan acuan teori *collective behavior* dalam gerakan sosial dari Sidney Tarrow (1996). Data dikumpulkan dengan *Focus Group Discussion*, wawancara, studi dokumentasi, dan kajian pustaka dengan dianalisa secara kualitatif. Studi ini menemukan adanya pergeseran orientasi gerakan mahasiswa Islam. Kecenderungan perubahan orientasi tersebut terindikasi karena fluktuasi politik nasional. Pada situasi ini, gerakan mahasiswa Islam telah mengalami beragam dinamika sosial. Salah satu dinamika yang muncul ketika model gerakan yang bersifat demonstrasi jalanan dengan bentuk lain melalui media sosial sebagai langkah untuk menyampaikan kritik sosial kepada pemerintah. Kajian ini merekomendasikan perlunya pertemuan nasional dengan menanggalkan atribut keorganisasian mahasiswa Islam. Tujuan sarasehan ini untuk menyikapi isu *common enemy* (musuh bersama) dan mengurai kebijakan yang tidak pro kepada rakyat.

## **Keywords:**

gerakan organisasi kemahasiswaan; Islam; transformasi sosial

## **Pendahuluan**

Pemuda memiliki peran penting dalam merebut kemerdekaan bangsa dari kolonial. Sejarah perjuangan pemuda terekam dalam angkatan 1908, 1928, 1966, 1974, 1990 dan 1998. Angkatan tersebut kerap dihubungkan dengan sejarah gerakan pemuda nasional (Anderson, 1988; Raillon, 1985; Suryomihardjo, 1980; Widjojo, 1999; Yozar, 1980). Gerakan pemuda juga kerap dipandang sebagai kontrol sosial terhadap pemerintah. Sejarah gerakan pemuda beriringan dengan kondisi masyarakat yang mengalami keresahan sosial (*social unrest*). Keresahan ini dianggap sebagai masalah yang disebabkan oleh pemerintah yang tidak akomodatif terhadap isu-isu keadilan dan kesejahteraan. Apalagi kondisi negara yang dipenuhi dengan kasus Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme

---

## **Korespondensi:**

Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, Indonesia 55281

Emai: [ahmad.izudin@uin-suka.ac.id](mailto:ahmad.izudin@uin-suka.ac.id)

(KKN). Kondisi ini menuntut pemuda turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi masyarakat.

Studi Usman menegaskan bahwa <sup>4</sup>gerakan mahasiswa pada tahun 1998 dapat dipetakan menjadi dua model, yakni gerakan moral dan politik. Sebagai gerakan moral, aksi solidaritas mahasiswa turun aksi jalanan menjadi kekuatan penggerak perubahan yang peka terhadap institusi birokrasi yang korup dan tidak transparan. Sementara sebagai gerakan politik, banyak mahasiswa yang terjebak pada tindakan politik praktis. Mahasiswa terjebak pada tawaran rezim untuk duduk di legislatif maupun eksekutif. Alhasil, gerakan ini terkesan bias perjuangan dan tidak sesuai dengan cita-cita perubahan (Usman, 1999).

Namun demikian, gerakan mahasiswa dapat dipandang sebagai fragmentasi kekuatan masyarakat untuk menciptakan lokus demokratisasi. Penelitian Akbar menjelaskan bahwa gerakan mahasiswa menjadi lokus kelompok berpendidikan yang peka terhadap masalah otoritarianisme. Gerakan ini menjadi nilai positif bagi perubahan sosial. Mahasiswa sebagai agen perubahan yang memiliki idealisme menjadi modal penting agar demokrasi tetap berjalan (Akbar, 2016). Namun era globalisasi telah merubah skema gerakan mahasiswa. Menurut studi Pamungkas, gerakan sosial berbasis buruh saja tidak menjamin aspirasi yang disampaikan dapat terakomodir. Hal ini sebagai konsekuensi adanya pengaruh ekonomi neoliberal yang menyandra pemerintah. Pemerintah seolah mengikuti kepentingan pemilik modal besar (Pamungkas, 2011).

Dari argumen di atas, peneliti belum menemukan studi yang mengarah kepada gerakan mahasiswa Islam. Namun harus diakui, gerakan mahasiswa Islam cenderung menggunakan konsep gerakan moral (*moral force*). Konsep ini menghendaki mahasiswa untuk bertindak sebagai kekuatan moral daripada gerakan politik. Dengan kata lain, mahasiswa muncul sebagai aktor politik ketika situasi negara sedang krisis. Pasca itu, mahasiswa pun kembali ke kampus untuk melanjutkan studi. Gerakan mahasiswa dengan konsepsi tersebut sifatnya hanya sekadar melakukan kritik terhadap suatu permasalahan negara.

Dengan demikian, gerakan mahasiswa mengalami polarisasi sebagai entitas baru. Hal ini terjadi karena faktor perbedaan ideologi, strategi, dan arah organisasi. Menurut pengamatan peneliti, gerakan mahasiswa pasca reformasi mengalami penurunan terutama aksi nyata di lapangan. Gerakan mahasiswa tidak lagi bersumber pada permasalahan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan sosial, justru cenderung terlibat dalam politik praktis. Implikasinya, gerakan mahasiswa tidak tampil sebagai agen perubahan sosial yang transformatif. Kecenderungan yang muncul hanya bersifat aksidental. Mahasiswa bergerak ketika ada kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat. Secara sederhana, gerakan mahasiswa cenderung bersikap apatis dengan aksi demonstrasi. Untuk itu, penelitian ini berusaha menelusuri orientasi gerakan mahasiswa Islam pasca reformasi. Studi ini juga bermaksud menyumbang pengetahuan tentang peta gerakan mahasiswa Islam di era kontemporer.

Penelitian ini dilakukan untuk melihat kecenderungan gerakan mahasiswa Islam pasca reformasi dan dianalisa secara kualitatif (Nawawi, 1992, p. 67). Sumber data penelitian terdiri dari hasil *Focus Group Discussion* (FGD), wawancara, studi dokumen, dan kajian pustaka. Transkrip wawancara merupakan hasil diskusi dan FGD dengan para aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Kesatuan Aksi Mahasiswa Islam Indonesia

(KAMII), dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)—semua proses pengambilan data dilakukan di Yogyakarta. Narasumber dipilih dengan alasan aktif dalam setiap kegiatan organisasi kemahasiswaan. Selain itu, data penunjang lain juga digunakan untuk memperkaya data yang terdiri jurnal, tesis, disertasi, dan laporan penelitian yang berhubungan dengan gerakan mahasiswa.

### ***Collective Behavior: Diskursus Gerakan Sosial***

Aspirasi pemuda selalu berhubungan erat dengan aksi solidaritas sosial mahasiswa. Aksi ini juga sebagai *morality movement* mahasiswa atas fenomena sosial. Selain itu, gerakan solidaritas sosial menjadi ruang aktualisasi diri mahasiswa yang selalu dihubungkan dengan *agent social of change* dan *social control*. Gerakan mahasiswa sama dengan gerakan sosial. Pola dan tindakan yang dilakukan mengarah kepada model kolektif (*collective behavior*). Menurut Tarrow, sifat gerakan sosial memiliki signifikansi dan fokus pada empat aspek, yakni tantangan kolektif, tujuan bersama, solidaritas, dan tindakan kolektif berkelanjutan. Keempat fokus ini penting dikaji dalam gerakan sosial (Tarrow, 1996, pp. 3–6).

Model kolektif dalam gerakan sosial dilakukan sebagai implementasi kelompok massa yang peka atas hegemoni negara. Untuk itu, gerakan sosial menjadi agenda dalam perjuangan untuk perubahan sosial. Perjuangan tersebut beriringan dengan tiga elemen penting, yaitu kesempatan politik, proses mobilisasi, dan framing isu (Tarrow, 1996, pp. 81–135). Tiga elemen ini dipandang sebagai teori dalam kajian ini. Dengan begitu, dimensi politik menjadi modal bagi kelompok massa untuk keluar dari tekanan hegemoni penguasa. Tekanan ini sebagai ekspresi untuk menunjukkan capaian gerakan sosial yang sesuai dengan tujuan awal. Maka kesempatan politik bagi pemeran politik dapat memberikan kesempatan bagi pihak eksternal dari kelompok lain yang akan melakukan tindakan gerakan sosial dalam meraih perubahan sesuai dengan tujuan masing-masing individu.

Studi gerakan sosial telah berkembang menjadi kekuatan politik dan kultural. Dua perkembangan ini sebagai kritik atas teori Castells, Touraine, Habermas, dan Melucci tentang *New Social Movement*. Model tersebut melahirkan paradigma baru. Munculnya paradigma ini sebagai anti-tesis model gerakan sosial yang telah lampau. Diskursus ini pun menjadi berwarna seiring dengan munculnya gagasan tindakan kolektif (*collective action*) dalam studi gerakan sosial. Secara umum, tindakan kolektif sebagai konsekuensi logis dari narasi yang berkembang di dunia. Semua model Gerakan sosial tersegmentasi dalam kekuatan tindakan kolektif yang dijalankan (Buechler, 1995).

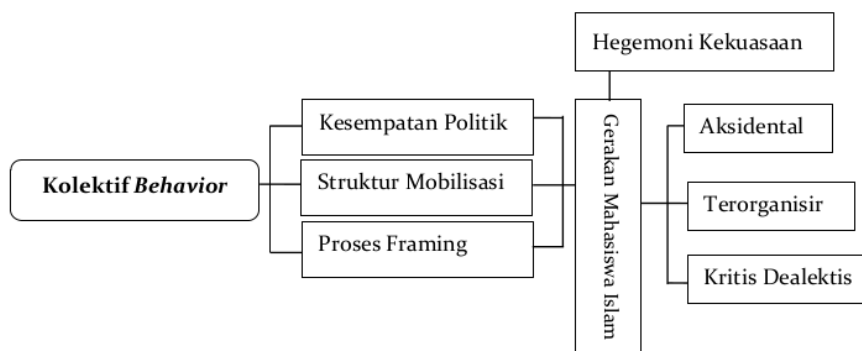
Pada kasus lain, literasi gerakan sosial dalam di beberapa negara Muslim, juga masuk dalam tipologi pembangunan. Tipologi ini beriringan atas kemajuan teknologi yang menyebabkan masyarakat lebih responsif dengan sikap politik yang terbuka. Masyarakat yang terbuka juga diidentifikasi sebagai masalah kompleks atas aktifitas sosio-politik di negara Muslim (Bayat, 2005). Hal ini membuat satu paradigma baru yang lebih inklusif dan memunculkan pola komunikasi yang cenderung sulit untuk dipahami.

Pola komunikasi yang beragam dalam tindakan kolektif sebagai efek langsung atas perubahan dunia global. Namun demikian, tindakan kolektif memunculkan fitur dalam aksi massa yang lebih solid—kerap disebut dengan solidaritas sosial. Model ini

muncul pasca perang dunia kedua yang lebih mengedepankan perubahan kebijakan negara dengan menuntut keadilan dan kesejahteraan. Sebagai diskursus, solidaritas bukan saja memunculkan satu fitur yang memperdebatkan ‘new’ atau ‘old’ *social movement*, namun mengarah kepada perubahan struktur masyarakat akibat adanya kelas sosial baru (Latoszek, 2006).

Dengan begitu, diskursus gerakan sosial telah menyegarkan ilmu sosial. Penyegaran tersebut menyumbang satu frame yang menjadi acuan dalam tulisan ini. Frame yang dibangun peneliti menyoal penggunaan teori dalam aplikasi *grounded research* sebagai multi-tafsir pendekatan fenomenologi. Diskursus ini peneliti gunakan sebagai pisau analisis dan kajian literatur. Sebagai literatur, peneliti menempatkan teori menjadi acuan pengembangan studi-studi yang berkembang. Sementara itu, sebagai pisau analisis, peneliti gunakan sebagai *framework* berpikir sehingga menemukan satu fenomena baru untuk dianalisis dalam perspektif studi *new social movement*. Adapun teori yang digunakan tentang tindakan kolektif (*collective action*) yang mengacu teori Tarrow. Sebagaimana tergambar dalam *framework* penelitian berikut ini.

Bagan 1. Kerangka Konseptual



Sumber: Data primer di olah, 2018.

Tiga *framework* di atas—kesempatan politik, struktur mobilisasi, dan proses framing—mengacu kepada konsep Tarrow. Pertama, kesempatan politik menegaskan pengaruh penataan sistem politik terhadap peluang untuk tindakan kolektif. Mekanisme kesempatan politik berupaya menjelaskan gerakan sosial yang disebabkan perubahan struktur politik (tumorang, 2007, p. 3). Model ini berangkat dari analisis Tarrow, yang berupaya menguji bentuk-bentuk ketegangan politik: gerakan sosial, revolusi, nasionalisme dan demokratisasi (Tarrow, 1996). Kesempatan politik merupakan mekanisme gerakan sosial yang muncul pada lembaga-lembaga politik yang mengalami keterbukaan. Konteks ini menjadi keseimbangan politik dari konflik kepentingan. Konflik tersebut sebagai kekuatan baru dalam tindakan kolektif untuk merubah struktur politik yang dijalankan oleh elit.

Kedua, struktur mobilisasi dalam gerakan sosial merupakan kegiatan untuk merangsang terbentuk pola baru dalam tindakan aksi nyata mahasiswa. Struktur mobilisasi adalah kendaraan kolektif baik formal maupun informal. Melalui model

ini mahasiswa diharapkan mampu memobilisasi dan berbaaur dalam aksi bersama. Konsep mobilisasi berkonsentrasi kepada jaringan informal, organisasi gerakan sosial dan kelompok-kelompok masyarakat. Selain itu, struktur mobilisasi tampil sebagai mekanisme sosial yang berkaitan dengan aksi-aksi kolektif. Tindakan aksi kolektif menjadi cara untuk menggait simpati dari beberapa segmen massa aksi, menguatkan jaringan, dan mencari simpatisan untuk pekerjaan advokasi sosial. Dengan begitu, tindakan kolektif menjadi alat untuk menorong partisipasi semua kelompok aksi massa (Situmorang, 2007, p. 7; Tarrow, 1996, p. 8).

Ketiga, proses framing memainkan peran penting dalam membentuk mobilisasi. Kombinasi kesempatan politik dan struktur mobilisasi dibentuk maka potensi aksi massa yang lebih besar dapat terjadi. Namun demikian, unsur penting yang patut diperhatikan adalah potensi struktural. Hal ini perlu dianalisis untuk memastikan proses mediasi dan advokasi sosial dapat terpenuhi sesuai dengan tujuan awal aksi massa. Untuk itu, komponen penting dalam framing isu dalam gerakan sosial ialah mendefinisikan masalah dan sumbernya sehingga prediksi capaian aksi massa sesuai dengan tujuan. Kegiatan ini menjadi elemen strategis untuk memperjuangkan masalah yang diangkat.

Ada tiga komponen framing yang dapat dijadikan bahan untuk menentukan pilihan strategi gerakan sosial. Pertama, masalah ketidakadilan. Ketidakadilan muncul dari kekusaran moral (*moral indignation*) yang diakibatkan oleh kebijakan yang tidak pro masyarakat sehingga melahirkan kekecewaan. Kedua, identitas individu yang tidak diperhatikan oleh kebijakan negara. Kondisi semacam ini memunculkan motivasi individu untuk melakukan aksi secara kolektif (Tarrow, 1996, p. 9). Ketiga, agensi yang mengacu pada keyakinan bahwa seseorang dapat mengubah kondisi hidup mereka. Konteks ini dapat memunculkan aktifitas individu untuk ikut berpartisipasi dalam gerakan sosial. Dengan harapan dapat mengubah nasib hidup mereka akibat kebijakan yang tidak memihak. Keyakinan semacam ini menjadi syarat dalam aksi massa untuk memunculkan agen-agen baru untuk memberikan motivasi positif dalam gerakan massa.

Penjabaran teori di atas, peneliti simpulkan gerakan sosial tidak berangkat dari ruang kosong. Namun ada sejumlah faktor yang menjadi pendorong lahirnya aksi gerakan massa. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi gerakan tersebut adalah ketidakadilan, kesejahteraan, dan kebijakan yang abai terhadap kepentingan hajat hidup orang banyak. Maka dari itu, perubahan sosial yang diidealkan, menurut perspektif ini, dapat mengubah kondisi hidup yang lebih baik.

## Pergeseran Orientasi Gerakan Mahasiswa Islam

Pemuda memiliki peran penting dalam pembangunan bangsa. Peran ini relevan di tengah problematika bangsa yang tak kunjung memberikan rasa keadilan. Problem keadilan sosial masih menjadi menara gading di negeri ini. Padahal, negeri ini sudah merdeka lebih dari 70 tahun. Di sinilah pemuda harus turut andil untuk berkontribusi menyelesaikan masalah sosial yang kompleks. Ruang kosong di tengah masalah yang mendera adalah searik harap yang bisa diisi oleh pemuda. Kekosongan tersebut dapat diisi oleh kegiatan produktif. Selain itu, pemuda juga dapat berkontribusi memberikan gagasan kritis untuk mengkritik negara yang kadang abai terhadap persoalan masyarakat. Kebijakan negara yang terkadang kurang

berpihak, menuntut pemuda menyuarakan gagasan dan ide untuk mengontrol pemerintah. Pada aspek inilah pemuda dapat turut andil bagi bangsa untuk mengontrol kebijakan yang cenderung pro terhadap kepentingan pasar.

"Pemuda atau mahasiswa harus turut berperan dalam persoalan yang mendera bangsa. Mahasiswa sebagai bagian dari pemuda harus kembali kepada *track*-nya sebagai kekuatan kontrol demokrasi. Jika tidak ada kontrol, pemerintah dan pengelola negara ini cenderung mengedepankan kepentingan pemodal. Apalagi bangsa ini sedang dihadapkan langsung kepada globalisasi yang tidak mengenal batas dan juga sudah menganut sistem ekonomi neoliberal. Sistem ini tidak lagi dapat dipungkiri seiring dengan perkembangan teknologi digital. Teknologi semacam cenderung menerabas kebijakan yang menguntungkan pegiat bisnis digital. Untuk itu, mahasiswa wajib mengontrol kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap kepentingan masyarakat (Rozaki, 2017)."

Negara menjadi simbol kekuasaan seorang presiden. Namun presiden yang tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat harus disikapi dengan kontrol sosial. Walaupun anggota sebagian kabinet negara ada alumni dari organisasi mahasiswa Islam—IMM, PMII, HMI dan KAMMI—yang menjadi pejabat publik. Namun jika sistem yang tidak memihak terhadap ideologi dari masing-masing organisasi kemahasiswaan, aktor politik yang menjabat sangat rentan dengan pragmatisme ekonomi neoliberal. Pada aspek ini cita-cita perubahan yang diusung oleh masing-masing alumni aktivis gerakan mahasiswa Islam seakan terjebak dalam pragmatisme politik.

Kondisi ini menjadi dilema ketika mahasiswa memiliki idealisme namun senior mereka yang berada ditampuk kekuasaan terjebak pada pragmatisme politik. Untuk itu, kritik yang membangun tetap perlu disampaikan mahasiswa dengan membentuk sinergi antara junior dengan senior yang menjadi pejabat publik. Hal ini dapat terwujud jika semua kalangan aktivis memiliki kesadaran yang sama untuk membangun bangsa.

"Mahasiswa tidak masalah jika mereka membangun afiliasi dengan pemerintah maupun senior atau alumni yang sudah menjadi pejabat publik. Namun mahasiswa tetap harus memperhatikan akar rumput organisasi sebagai dasar melakukan tindakan yang memiliki nalar kritis. Mahasiswa jangan sampai terjebak pada pragmatisme politik senior mereka sehingga nalar kritisnya tumpul (Andi, 2017a)."

Organisasi mahasiswa Islam telah mengalami pergeseran orientasi gerakan. Pergeseran ini tidak dapat ditepis seiring dengan tumpulnya gerakan mahasiswa. Perubahan gerakan tersebut dianalisis karena paradigma berpikir mahasiswa mengarah pada pragmatisme. Mahasiswa sebagai intelektual yang memiliki *sense of belonging* pada perubahan sosial tampak layu. Hal ini terjadi karena mahasiswa menjadi entitas baru dalam masyarakat yang kurang peka terhadap fenomena ketidakadilan dan kesenjangan. Tidak salah bila mahasiswa menjadi kelas sosial baru dalam struktur masyarakat (Izudin, 2017, pp. 70–76; Jurdi, 2013).

Pada aspek lain, mahasiswa sebagai agen kontrol kebijakan pemerintah tidak tampak. Banyak aktivis mahasiswa terjebak pada perjuangan semu. Perjuangan model ini disinyalir karena tersandra oleh pragmatisme politik. Politik menjadi jurang pemisah idealisme mahasiswa. Jurang tersebut telah melanda semua elemen baik mahasiswa yang masuk ke dunia profesional maupun politik. Hal ini terjadi karena

ideologi organisasi aktivis mahasiswa hanya menjadi pegangan ketika mereka masih berproses.

Setelah selesai dari aktifitas organisasi, mahasiswa dapat terjebak dalam pragmatisme politik. Kondisi ini harus diubah baik secara metode maupun *mindset* berpikir. Salah satu tawaran paling *genuine* menciptakan kader organisasi mahasiswa menjadi peneliti. Dengan menjadi peneliti ketika menghadapi masalah sosial dapat disampaikan kepada pemerintah berbasis data dan fakta lapangan. Tawaran kebijakan berbasis data dapat di dengar langsung oleh pemerintah.

Kritik yang rasional berdasarkan fakta ilmiah sangat dibutuhkan. Selain dapat memetakan masalah juga menjadi catatan untuk orientasi perubahan kebijakan. Apalagi jika mahasiswa mampu melakukan advokasi sosial yang transformatif sesuai data ilmiah yang dihasilkan. Oleh karena itu, orientasi gerakan mahasiswa harus berubah. Perubahan ini menuntut mahasiswa agar mampu meningkatkan kapasitas individu berbasis pengetahuan dan fakta ilmiah.

Kondisi semacam itu dapat dilakukan bila mahasiswa memiliki kesadaran untuk memperdalam ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek). Dengan kemampuan yang adaptif sesuai perkembangan Iptek, bukan mustahil jika transformasi sosial dapat terwujud. Penguasaan Iptek dapat menjadi landasan mahasiswa terutama perubahan ideologi organisasi. Tentu saja, organisasi dan aktivis mahasiswa tidak lagi hanya menjadi seorang yang tabu. Namun harus betul-betul menjadi *problem solver* di masyarakat yang mengalami ketertindasan secara struktural atas kekuatan hegemoni. Apalagi era pasar bebas dapat menciptakan ruang dan kelas sosial baru.

## Dinamika Gerakan Mahasiswa Islam Pasca Reformasi

Hegemoni kekuasaan yang dipopulerkan Antonio Gramsci (1891-1937) dipandang berpengaruh terhadap gerakan sosial abad 21. Gagasan Gramsci tersebut sangat kontekstual dengan kajian ini yang meyoal dominasi kekuasaan karena didorong kekuatan fisik. Perspektif Gramsci menerapkan kekuasaan sebagai unsur perangkat kerja hegemoni (Gramsci, 2013; Sugiono, 2006).

Perangkat kerja tersebut meliputi unsur pemerintah sebuah negara. Perangkat ini cenderung melakukan tindakan represif dan bermuansa *law enforcement*. Pranata negara melalui lembaga hukum, militer, dan polisi terkadang menjadi “buah simalakama”. Pranata negara cenderung represif kepada kelompok yang kritis. Hal ini banyak korban dari masyarakat yang berujung tinggal di penjara. Sementara itu, etos negara untuk menutupi kekurangan pengelolaan cenderung berkuasa melalui kehidupan beragama, pendidikan, kesenian, dan keluarga (Mustain, 2007).

Tindakan represif negara kepada masyarakat kritis dapat di bendung oleh kekuatan masyarakat sipil (*civil society*). Kelompok ini mampu mendirikan lembaga Non Government Organizations (NGOs), organisasi sosial dan keagamaan, paguyuban, dan kelompok kepentingan (*interest groups*) (Fakih, 1998; Hakim, 2011). Organisasi *grassroots* tersebut menjadi kunci masyarakat agar dapat keluar dari zona hegemoni kekuasaan.

Dengan begitu, lokus sosial yang diciptakan masyarakat kritis menjadi modal untuk menepis hegemoni. Kondisi ini memang tidak tampak secara nyata yang berbeda dengan kebijakan yang tidak populis. Namun sebagai subsistem dalam



negara, hegemoni menjadi inspirasi para birokrat untuk melanggengkan kekuasaan mereka. Tentu saja, kekuasaan yang dibangun melalui model tersebut menjadi cara efektif penguasa untuk melakukan komunikasi. Citra positif diciptakan untuk mengembangkan *trend* pembangunan. Dengan *trend* ini negara menjadi benar di mata orang awam. Padahal, jika lebih kritis kondisi bangsa penuh dengan masalah yang *crowded*. Tindakan kolusi, korupsi, dan nepotisme adalah masalah yang belum usai. Oligarki politik menjadi fenomena krusial di negara demokrasi. Neoliberalisme menjadi ideologi para birokrat. Tikus berdasi masih berkeliaran di ranah eksekutif maupun legislatif. Masyarakat seolah tidak berdaya dan dibuat buta atas persoalan yang sungguh kompleks tersebut (Winters, 2013).

Kompleksitas masalah negara membuat mahasiswa patut untuk gelisah. Sebagai kelompok masyarakat yang berpendidikan tentu turut merasa prihatin atas kondisi yang terjadi. Namun gerakan mahasiswa belum menemukan momentum atau tidak memiliki *common enemy* yang nyata. Para birokrat semacam anti-tesa ideologi bangsa. Di permukaan publik terkesan membela kepentingan masyarakat. Sementara itu, dibalik perannya, mereka membuat kesepakatan yang hanya menguntungkan sebagian kelompok elit. Kelemahan pemerintah ditutupi oleh citra positif yang selalu menghiasi sisi layar kaca. Kritik membangun dari mahasiswa juga tertutupi oleh citra positif yang selama ini menghiasi sisi dunia maya. Itulah hegemoni kekuasaan yang diterapkan oleh para birokrat negeri ini.

Demokrasi menjadi sistem yang membutuhkan nalar kritis mahasiswa. Pola gerakan mahasiswa pun tidak bertaji dalam menanggapi berbagai isu nasional. Ruang kebebasan juga seolah tidak berimplikasi nyata. Kondisi ini seakan membuat masalah baru. Ruang ekpresi kritis mahasiswa menjadi tidak tampak. Gerakan mahasiswa menemui jalan buntu. Idealisme sebagian mahasiswa patah oleh kepentingan elit. Gerakan nyata dari *grassroots* pun hanya bersifat aksidental.

Kondisi semacam itu sudah lama dirasakan oleh mahasiswa. Namun gerakan mahasiswa belum menemukan momentum bersama. Beberapa organisasi mahasiswa Islam di Yogyakarta menanggapi berbagai isu hanya sebatas memperkuat kondisi internal. Gerakan mahasiswa belum mampu membangun konsolidasi dengan lintas organisasi. Selain itu, fakta semakin tumpulnya gerakan mahasiswa juga dipengaruhi langsung oleh sistem pendidikan. Mahasiswa tidak cukup waktu untuk melakukan advokasi sosial. Mereka harus bergelut menyelesaikan studi yang begitu pendek. Doktrin agar segera lulus dan tidak ada dukungan kampus juga sebagai faktor mantulnya daya kritis mahasiswa.

"Stagnasi gerakan mahasiswa sekarang dipengaruhi oleh banyak organisasi baru. Belum lagi kampus yang mengkampanyekan organisasi mahasiswa, termasuk Badan Eksekutif Mahasiswa dituding sebagai orang-orang yang tidak berprestasi. Kampus selalu membuat stigma negatif kepada keberadaan organisasi ekstra. Selain itu, kampus menganggap mahasiswa yang hanya rajin kuliah, berprestasi dan nilai bagus. Padahal, tidak ada jaminan tipe mahasiswa yang dibuat sebagai standar otoritas kampus paham dengan problem dan realitas masyarakat (Andi, 2017b)."

Otoritas kampus yang memandang mahasiswa negatif dan positif sejak era reformasi. Kondisi ini tidak terlepas kebijakan negara yang memberlakukan NKK/BKK. Kebijakan ini lahir di era Mendikbud Daoed Joesoef yang mengeluarkan Surat Keputusan No. 0156/U/1978 tentang Normalisasi Kehidupan Kampus. Kebijakan tersebut menjadikan kampus sebagai kawasan steril dari aktivitas

politik. SK ini juga menjadi dalil sah pembubaran Senat Mahasiswa dan Dewan Mahasiswa di tiap perguruan tinggi.

Namun era reformasi membawa berkah bagi organisasi ekstra kampus. Organisasi dan gerakan mahasiswa tumbuh di kampus seluruh Indonesia. Gerakan reformasi telah menjadi inspirasi dan spirit gerakan mahasiswa. Implikasinya, kampus membentuk organisasi BEM mulai dari Fakultas hingga Dewan Mahasiswa. Eksistensi BEM diperkuat oleh keberadaan organisasi ekstra kampus yang tumbuh subur di era reformasi. Organisasi mahasiswa Islam yang paling kuat di era reformasi adalah KAMMI, HMI, PMII, dan IMM.

Reformasi telah usai. Era ini sudah berusia 20 tahun. Cita-cita reformasi sudah terwujud. Demokrasi adalah wujud dari cita-cita reformasi. Siapapun anak bangsa yang terbaik di negeri ini bisa menjadi pemimpin. Tanpa harus lahir dari ningrat, orang yang memiliki kapabilitas menjadi pemimpin dapat terwujud. Jokowi adalah *role model* produk dari reformasi. Sosok sederhana dari kampung mampu menjadi seorang presiden. Itulah makna sesungguhnya dari proses reformasi. Namun perjalanan bangsa tidak hanya selesai pada tahap melahirkan kepemimpinan. Pembangunan bangsa yang lebih bermartabat untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan poin penting yang harus tercapai.

Pasca reformasi, organisasi kemahasiswaan mengalami kemunduran gerakan terutama untuk mencari isu bersama. Gerakan mahasiswa menjadi jago kandang. Kampus seolah menjadi tujuan akhir para aktivis. Gerakan normalisasi dan kembali ke kampus telah menjadi konsesus bersama elemen pemerintah dan penguasa untuk membatasi aktivitas mahasiswa dalam bidang politik. Artinya, hegemoni pemerintah dan penguasa menemui momen kemenangannya dalam menormalisasi aktivitas mahasiswa. Rantai kemenangan ini diperoleh melalui konsesus bersama tanpa melakukan tindakan represi dan penindasan terhadap elemen aktivis mahasiswa. Menurut Hegel, model ini adalah cara yang dipakai menggunakan saluran universitas yang menjadi penentu secara langsung dan tidak langsung struktur-struktur kognitif dari masyarakat kampus sendiri. Hasilnya, konsesus tersebut membentuk sebuah hegemoni yang akhirnya dipandang benar dan baik secara moral maupun intelektual.

Saat ini, pola gerakan mahasiswa cenderung bertumpu pada relasi hubungan internal yang lebih instruktif. Relasi antar organisasi masih bertumpu pada level diskursus yang bersifat wacana teoritis sebagai kesadaran kritis anggota organisasi. Pengaruh dari senior yang telah menjadi pejabat pemerintah lebih dominan karena terbangun pola komunikasi yang searah dalam menentukan arah masa depan organisasi serta aktivitasnya.

"Pengaruh senior yang duduk di pemerintahan (eksekutif dan legislatif) dalam merespon kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat? Ada hal-hal yang bersifat instruksi, pengaruhnya tidak signifikan karena adanya jarak dengan alumni. Alat komunikasinya dan melalui forum-forum, dan komunikasi sering terputus (Sofyan, 2017).

Menurut aktivis IMM, respon organisasi terhadap isu-isu nasional masih bertumpu pada pendapat dan pemikiran senior yang telah menjabat di pemerintah. Bahkan diakui, aksi demonstrasi yang dilakukan organisasi sering kali karena adanya instruksi para senior yang ada di kekuasaan meskipun isu yang direspon telah melalui proses diskusi internal organisasi. Artinya, keterikatan IMM dengan senior yang berkuasa masih terjadi. Isu dan aktivitas yang bersifat kritis seperti demonstrasi masih

menggunakan pandangan senior daripada keputusan dan pembacaan aksi secara bersama yang dilakukan independen di internal organisasi.

Menurut Situmorang, mekanisme kesempatan politik berupaya menjelaskan bahwa gerakan sosial terjadi disebabkan oleh perubahan dalam struktur politik yang dilihat sebagai kesempatan (Situmorang, 2007, p. 3). Hal ini juga dipertegas Tarrow bahwa mekanisme kesempatan politik dalam gerakan sosial muncul ketika akses terhadap lembaga politik negara mengalami keterbukaan. Keseimbangan politik dapat terbentuk ketika elit politik mengalami konflik kepentingan. Konflik ini digunakan untuk perubahan yang bersifat menguntungkan kolektifitas kelompok elit (Tarrow, 1996, p. 4).

Pola serupa juga terjadi di PMII. Menurut aktivis PMII, senior tidak diperkenankan mempengaruhi wacana dan diskusi serta pembacaan isu di internal organisasi. Tema diskusi dan pembacaan berangkat dari kesadaran kritis anggota organisasi sesuai nilai-nilai perjuangan. “*Menyikapi isu yang sedang berlangsung memang berangkat dari ide dan gagasan sahabat-sahabat yang terbiasa melakukan pembacaan*” tutur Zaen (Zaen, 2017).

Dengan kata lain, aktivitas keorganisasian mahasiswa Islam pasca reformasi masih bergantung kepada komunikasi senior yang menjadi pejabat publik. Hubungan ini membentuk suatu persekutuan politik dalam menyikapi isu-isu nasional. Secara langsung, persekutuan ini hanya berpihak kepada kepentingan kelompoknya. Ada juga organisasi kemahasiswaan yang berpegang pada nilai-nilai dasar keorganisasian namun tetap tidak bisa terlepas dari kepentingan afiliasi politiknya.

Struktur mobilisasi gerakan mahasiswa berbau dengan kepentingan elit kekuasaan sehingga menciptakan isu bersama atas dasar kepentingan kelompok. Konsep mobilisasi ini terkonsentrasi kepada jaringan informal dan eksternal organisasi pada kelompok dan organisasi politik (Akbar, 2016). Artinya, pola semacam ini muncul akibat hubungan emosional antar anggota organisasi dengan senior mantan anggota. Ada kesamaan-kesamaan di antara mereka, termasuk kesamaan ideologi, program, tujuan, basis massa dan kepemimpinan.

Secara etimologi, gerakan aksidental (*accidental movement*) memiliki makna yang bertautan dengan *accidental attribute*, *accidental property*, *characteristic quality* atau *accidental predicate* (Arrington, 2016, p. 234). Dengan kata lain, gerakan aksidental juga dapat diartikan sebagai tindakan untuk bergerak sesuai dengan kondisi sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Hal ini melahirkan dinamika sosial yang bersifat evolutif dengan menggambarkan suatu peristiwa sosial. Untuk itu, perubahan tidak terjadi secara tiba-tiba melainkan bersifat gradual. Dalam konteks gerakan mahasiswa, Hijrian mengatakan: “*kondisi mahasiswa pasca 1998 belum menemukan arah gerakan bersama, konsolidasi lintas gerakan mahasiswa belum berjalan secara maksimal*” (Hijrian, 2018). Ini artinya, gerakan mahasiswa pasca reformasi tidak memiliki visi perubahan yang jelas.

Fenomena gerakan aksidental juga dipertegas Aris, Mantan Presma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Menurutnya, “*gerakan mahasiswa pasca 1998 lebih banyak bermotifuforia sejarah, tidak ada visi, spontan dan gamang*”. Pernyataan ini senada dengan gerakan aksidental dalam menyikapi beragam isu. Misal isu kenaikan BBM tahun 2010, organisasi PMII melakukan aksi demonstrasi di pertigaan kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, disusul dengan organisasi mahasiswa lainnya seperti HMI, KAMMI, IMM, GMNI, PMKRI yang menilai kebijakan tersebut merugikan

rakyat. Artinya, gerakan tersebut bersifat aksidental karena hanya mengikuti dinamika yang sedang berkembang di ranah sosial-politik tanah air. Aksi-aksi protes organisasi mahasiswa juga muncul hanya seketika. Setelah ada kebijakan kenaikan harga BBM yang mereka nilai telah membenani kehidupan masyarakat luas.

Contoh lain, ialah organisasi mahasiswa di Yogyakarta yang kerap membangun sebuah aliansi bersama, biasanya Aliansi BEM Jogja, Aliansi Lintas Organ, dan lainnya. Aksi ini dilakukan untuk mengkritik kebijakan negara yang kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kondisi ini membuat mahasiswa harus mampu berkoordinasi dengan kekuatan pergerakan lain seperti buruh, petani, nelayan, keagamaan, perkumpulan profesi, dan lain-lain. Dengan gerakan yang terorganisir maka kekuatan advokasi sosial menjadi lebih tajam untuk perubahan sosial.

Hal ini senada dengan perspektif Gramscian. Konsep gerakan mahasiswa dapat dikategorikan sebagai kekuatan masyarakat sipil yang terorganisir. Konsep tersebut dianalisa melalui kepentingan negara (*state*) dengan masyarakat sipil (*civil society*). Masyarakat sipil terdiri dari berbagai bentuk masyarakat yang berada dalam aktivitas ideologi dan intelektual yang dinamis maupun konstruksi hegemoni. Dengan demikian, masyarakat sipil adalah suatu agregasi atau percampuran kepentingan yang ditransformasikan menjadi pandangan lebih universal sebagai ideologi (Fakih, 1996, p. 41).

Sementara itu, mahasiswa adalah kaum terdidik. Gerakan kritis menjadi ciri utama dalam setiap agenda perubahan. Kritis menjadi karakteristik gerakan mahasiswa dengan alasan bahwa mereka memiliki organisasi yang jelas serta visi, misi perjuangan yang telah dirumuskan secara jelas pula. Menurut Tarrow, gerakan sosial berangkat dari pendekatan teoritis yang menekankan pada empat faktor, di antaranya ketidakpuasan, sumber daya, peluang politik, dan proses-proses konstruksi pemaknaan (Tarrow, 1996).

Dengan begitu, organisasi mahasiswa ketika menanggapi sebuah isu, memaksa adanya diskusi kritis sebelum akhirnya memutuskan suatu kesimpulan bersama (konsesus) yang dijadikan sebagai tujuan gerakan. Mahasiswa menciptakan gerakan secara bersama dengan cara menggelar audiensi. Hal ini dilakukan dengan advokasi sosial melalui perhimpunan dengan berbagai kalangan di gedung DPRD Yogyakarta. Mahasiswa dengan Aliansi Gerakan Rakyat tahun 2014, menyampaikan kritik dan aspirasinya terhadap permasalahan yang terdapat dalam kebijakan agraria dan pembangunan Yogyakarta New International Airport.

Namun gerakan tersebut tidak membuat semua organisasi mahasiswa Islam dapat bersatu untuk menyikapi isu agraria. Misal, KAMMI lebih melihat pada aspek pendidikan. Sebab, konstruksi pendidikan dinilai sangat menentukan aras berpikir mahasiswa (kader) dalam mencermati kebijakan penguasaan dan perkembangan sosial masyarakat. Dengan kata lain, ketika pendidikan mampu tumbuh dan berkembang membentuk karakter dan cara berpikir mahasiswa niscaya sikap dan pikiran kritis akan dengan sendirinya muncul lalu kemudian menggugah diri untuk melakukan sebuah gerakan perubahan.

IMM lebih memilih untuk menciptakan gerakan kritis dialektis. Komunikasi kelembagaan dinilai sebagai jalan alternatif dalam mengkritisi kebijakan yang tidak sejalan dengan kehendak rakyat. Artinya, gerakan perubahan dimulai ketika forum tersebut mampu melahirkan sesuatu hal yang memang semestinya dikritisi. *Sharing*

gagasan dan ide adalah jalan yang ditempuh PMII untuk menumbuhkan gerakan kritis dialektis. Sebab, sharing gagasan dinilai tidak hanya untuk membangun daya kritis tetapi juga merancang dan membicarakan arah perjuangan organisasi.

Secara umum, gerakan mahasiswa Islam tercermin ke dalam dua bagian. Pertama, aksi demonstrasi di jalan setelah mencermati secara kritis suatu kebijakan. Kedua, menggelar diskusi dan forum-forum terbuka lainnya untuk menyampaikan aspirasi sesuai dengan komitmen perjuangan, terlebih pasca gerakan reformasi. Upaya-upaya organisasi mahasiswa dalam membuat gerakan perubahan selalu menciptakan dinamikanya masing-masing sesuai dengan perkembangan dan perubahan zaman. Tantangan terberatnya adalah bahwa aksi demonstrasi dengan cara turun ke jalan dalam rangka menyampaikan aspirasi dan kritik kini telah terlanjur dianggap *aib* bagi sebagian besar masyarakat karena dianggap sudah tidak produktif. Maka dari itu, perlu adanya agenda lain yang lebih elegan dalam menyampaikan kritik sosial kepada pemerintah.

## Penutup

Meta analisis gerakan mahasiswa Islam paca reformasi menuai dinamika sosial yang lebih dinamis. Aksi gerakan mahasiswa sarat dengan kepentingan elit partai politik. Selain itu, gerakan mahasiswa Islam yang memiliki acuan dan tindakan dalam bergerak yang ditandai gerakan terorganisir ini dapat dilihat dari masing-masing organisasi mahasiswa Islam yang memiliki seperangkat AD/ART dalam melakukan gerakan sosial sebagai bagian dari advokasi sosial.

Di lain aspek, pola gerakan mahasiswa Islam pasca reformasi, kecenderungannya, ada tiga pola yang dapat kategorisasikan, yaitu (1) perlawanan terhadap hegemoni negara, (2) pergeseran ideologi gerakan mahasiswa Islam, dan (3) format gerakan mahasiswa Islam di masa mendatang. Secara umum, pola gerakan ini mengacu pada perkembangan zaman di era kekinian yang kontekstual dengan persoalan internasional dan kebangsaan Indonesia. Dengan melihat kondisi kenyataan di atas, penulis merekomendasikan perlu adanya sarasehan nasional antara lembaga keorganisasi mahasiswa Islam yang bersifat inklusif dan menanggalkan gerakan politik praktis. Maka dari itu, disarankan kepada semua organisasi mahasiswa Islam harus mampu membuka diri dan terus bedialog seiring dengan perkembangan politik yang tidak menentukan.

## Ucapan Terima Kasih

Terima kasih penulis haturkan kepada Abulaka, M.Sos yang sudah berkenan untuk mempublikasikan kembali hasil penelitian ini. Data-data penelitian yang terpublikasi, penulis olah kembali menjadi draft artikel yang awalnya merupakan data-data untuk laporan penulisan tesis pada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.

## Pendanaan

Penulis tidak menerima bantuan pendanaan untuk penelitian dari pihak manapun. Penelitian ini murni dari hasil data lapangan yang bersama-sama ketika mengadvokasi kebijakan-kebijakan negara melalui konsolidasi lintas organisasi ekstra kampus.

## Daftar Pustaka

- Akbar, I. (2016). Demokrasi dan Gerakan Sosial (Bagaimana Gerakan Mahasiswa Terhadap Dinamika Perubahan Sosial). *Jurnal Wacana Politik*, 1(2). <https://doi.org/10.24198/jwp.v1i2.11052>
- Anderson, B. (1988). *Revolusi Pemoeda, Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944 - 1946*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Arrington, C. L. (2016). *Accidental Activists: Victim Movements and Government Accountability in Japan and South Korea*. Ithaca: Cornell University Press.
- Bayat, A. (2005). Islamism and Social Movement Theory. *Third World Quarterly*, 26(6), 891-908.
- Buechler, S. M. (1995). New Social Movement Theories. *The Sociological Quarterly*, 36(3), 441-464.
- Fakih, M. (1996). *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fakih, M. (1998). *Petani dan Penguasa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gramsci, A. (2013). *Prison Notebooks Catatan-Catatan Dari Penjara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hakim, L. N. (2011). Governance and New Mode of Governing: Indonesia as Metaphor. *JSP Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 15(2), 111-123. <https://doi.org/10.22146/jsp.11388>
- Hijriani, A. (2018). *Wawancara*. Yogyakarta.
- Izudin, A. (2017). *Gerakan Sosial Petani: Strategi, Pola dan Tantangan di Tengan Modernitas*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Jurdi, S. (2013). Gerakan Sosial Islam: Kemunculan, Eskalasi, Pembentukan Blok Politik dan Tipologi Artikulasi Gerakan. *Jurnal Politik Profetik*, 1(1). <https://doi.org/10.24252/JPP.VIII.1615>
- Latoszek, M. (2006). "Solidarity"—A Contribution to Social Movement Theory. *Polish Sociological Review*, 153, 39-53.
- Mustain. (2007). *Petani Versus Negara: Gerakan Sosial Petani Melawan Hegemoni Negara*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Nawawi, H. (1997). *Instrumen Metodologi Penelitian Sosial*. Yogyakarta: UGM Press.
- Pamungkas, C. (2011). The History of the Labour Movement in South Korea 1947-1997: The Role of Blue Collar and White Collar Workers. *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi*, 16(2), 115-140. <https://doi.org/10.7454/mjs.v16i2.4964>
- Raillon, F. (1985). *Politik dan Ideologi Mahasiswa Indonesia: Pembentukan dan Konsolidasi Orde Baru 1966-1974*. Jakarta: LP3ES.
- Situmorang, A. W. (2007). *Gerakan Sosial: Studi Kasus Beberapa Perlawanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiono, M. (2006). *Kritik Antonio Gramsci terhadap Pembangunan Dunia Ketiga* (2nd ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suryomihardjo, A. (1980). *Budi Utomo Cabang Betawi*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Tarrow, S. (1996). *Power in Movement: Social Movements, Collective Action and Politics*. UK: Cambridge University Press.
- Usman, S. (1999). Arah Gerakan Mahasiswa: Gerakan Politik Ataukah Gerakan Moral? *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(2), 146-163. <https://doi.org/10.22146/JSP.11136>
- Widjojo, M. S., & Et.al. (1999). *Penakluk Rezim Orde Baru: Gerakan Mahasiswa '98*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Winters, J. (2013). *Oligarchy and Democracy in Indonesia*. New York: Southeast Asia Program Cornell University.
- Yozar, A. (1980). *Angkatan 66: Sebuah Catatan Harian Mahasiswa*. Jakarta: Pustaka Sinar

### Harapan.

Wawancara

Andi. (2017a). *Wawancara*. Yogyakarta.

Andi. (2017b). *Wawancara*. Yogyakarta.

Rozaki, A. (2017). *Wawancara*. Yogyakarta.

Sofyan, H. (2017). *Wawancara*. Yogyakarta.

Zaen, M. (2017). *Wawancara*. Yogyakarta.

### Tentang Penulis

**Ahmad Izudin** adalah dosen tetap di Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, memiliki minat kajian gerakan sosial, pemberdayaan masyarakat, kebijakan sosial, dan kajian Islam interdisipliner.

# Politika\_Mengurai Kecenderungan Gerakan Mahasiswa

## ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX

6%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://ejournal.unri.ac.id">ejournal.unri.ac.id</a> Internet Source	2%
2	<a href="http://anzdoc.com">anzdoc.com</a> Internet Source	1%
3	Submitted to iGroup Student Paper	1%
4	<a href="http://es.scribd.com">es.scribd.com</a> Internet Source	1%
5	<a href="http://atavisme.web.id">atavisme.web.id</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://jurnal.univrab.ac.id">jurnal.univrab.ac.id</a> Internet Source	1%
7	Submitted to Central Queensland University Student Paper	1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography Off



